

# **KINERJA INVESTASI PEMBIBITAN MENUJU KEMANDIRIAN USAHA UNGGAS LOKAL**



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN**  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2012





# KINERJA INVESTASI PEMBIBITAN MENUJU KEMANDIRIAN USAHA UNGGAS LOKAL

Penyusun:

Tjeppy D. Soedjana  
Budi Haryanto  
Atien Priyanti  
Hasanatul Hasinah  
Bess Tiesnamurti



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN**  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2012

# KINERJA INVESTASI PEMBIBITAN MENUJU KEMANDIRIAN USAHA UNGGAS LOKAL

Hak Cipta ©2012. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan  
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan  
Jl. Raya Pajajaran Kav.E-59  
Bogor, 16151  
Telp. : (0251) 8322185  
Fax : (0251) 8328382; 8380588  
Email : criansci@indo.net.id

Isi buku dapat disitasi dengan menyebutkan sumbernya

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Kinerja Investasi Pembibitan Menuju Kemandirian Usaha Unggas Lokal/  
Tjeppy D. Soedjana dkk. – Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan  
Peternakan, 2012: vi + 40 hlm; illus.; 16 x 20,5 cm.

ISBN 978-602-8475-55-6

1. Unggas Lokal      2. Investasi      3. Pembibitan  
I. Judul;              II. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan;  
III. Soedjana, T.D.

637:339:563

## KATA PENGANTAR

Produk ayam dan itik lokal merupakan salah satu prioritas sumber pasokan daging yang 'emerging' dapat diandalkan setelah upaya pencapaian swasembada daging sapi tahun 2014. Di sisi lain, perkembangan permintaan daging ayam dan itik lokal diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan upaya pemenuhan kebutuhan daging bagi masyarakat.

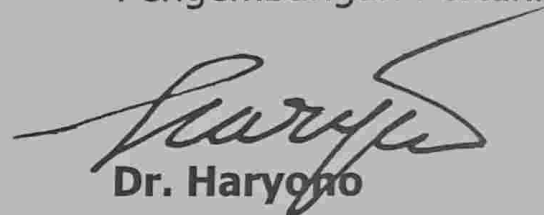
Sudah saatnya perlu untuk dikembangkan usaha pembibitan ayam dan itik lokal secara *massive* untuk menjamin kecukupan produksi bibit *day old chick* (DOC) dan *day old duck* (DOD) sesuai dengan permintaan pelaku usaha. Saat ini, sangat sedikit atau hampir tidak ada perusahaan swasta yang bergerak di bidang pembibitan ayam dan itik lokal secara komersial. Jika ada, skala usaha masih relatif kecil, sehingga jumlah DOC dan DOD yang dihasilkan belum mampu memenuhi permintaan pasar. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok-kelompok peternak unggas lokal yang mengusahakan pembibitan, namun masih sangat beragam kualitas bibit yang dihasilkan dan distribusi pasar yang masih bersifat lokal maupun regional.

Sehubungan dengan hal tersebut Puslitbang Peternakan telah menyelenggarakan *roundtable discussion* yang bertemakan 'Kinerja Investasi Pembibitan Menuju Kemandirian Usaha Unggas Lokal'. Diskusi ini melibatkan para pakar, praktisi dan pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta *stakeholder* terkait di bidang usaha unggas lokal. Hasil-hasil diskusi tersebut dirangkum dalam *booklet* ini agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak terkait dengan saran dan rekomendasi tindak lanjutnya yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung sehingga acara ini terselenggara dengan baik. Semoga buku ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Bogor, Agustus 2012

Kepala Badan Penelitian dan  
Pengembangan Pertanian



Dr. Haryono



## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| Kata Pengantar .....   | iii |
| Daftar Isi .....   | v   |
| Pendahuluan .....  | 1   |
| Tahapan Kegiatan .....   | 3   |
| Sasaran dan Tujuan .....   | 5   |
| Sasaran .....  | 5   |
| Tujuan .....   | 5   |
| Isu Strategis Pengembangan Unggas Lokal .....  | 5   |
| Skala Usaha dan Kebutuhan Investasi .....  | 7   |
| Peluang Pengembangan Pembibitan .....  | 8   |
| Analisis Investasi Usaha Pembibitan .....  | 10  |
| Langkah Tindak Lanjut .....  | 12  |
| Rekomendasi Kebijakan .....  | 13  |
| Matriks Rencana Tindak Kinerja Investasi Pembibitan<br>Menuju Kemandirian Usaha Unggas Lokal ..... | 16  |
| Daftar Bacaan .....  | 19  |
| Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Strategis<br>Pternakan dan Veteriner .....          | 22  |
| Tim Perumus .....  | 22  |
| Lampiran .....   | 23  |
| Program Pengembangan Pembibitan Unggas Lokal .....   | 25  |

|   |    |
|---|----|
| Prosedur Usulan atas Perubahan Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ..... | 27 |
| Skala Usaha, Kelayakan Ekonomik, dan Kebutuhan Investasi Usaha Pembibitan Ayam Lokal .....  | 29 |
| Skala Usaha, Kelayakan Ekonomik, dan Kebutuhan Investasi Usaha Pembibitan Itik Lokal .....  | 31 |
| Model Usaha Berbasis Kelompok untuk Pengembangan Usaha Pembibitan Ayam Lokal .....  | 33 |
| Model Usaha Berbasis Kelompok untuk Pengembangan Usaha Pembibitan Itik Lokal .....  | 35 |
| Pembibitan Unggas Lokal .....   | 37 |
| Prospek, Penyiapan dan Penangkaran Ayam Lokal Terseleksi Hasil Riset atau Kerjasama Riset .....   | 39 |



## PENDAHULUAN

Perkembangan permintaan daging ayam dan itik lokal diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan upaya pemenuhan kebutuhan daging bagi masyarakat. Ayam kampung dan itik lokal merupakan salah satu prioritas sumber pasokan daging yang dapat diandalkan setelah upaya pencapaian swasembada daging sapi tahun 2014. Hasil rumusan *scooping meeting* yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan tanggal 13 Desember 2011 menunjukkan perlunya dikembangkan usaha pembibitan ayam dan itik lokal secara *massive* untuk menjamin kecukupan produksi bibit *day old chick* (DOC) dan *day old duck* (DOD) sesuai dengan permintaan pelaku usaha. Saat ini, sangat sedikit atau hampir tidak ada perusahaan swasta yang bergerak di bidang pembibitan ayam dan itik lokal secara komersial. Jika ada, skala usaha masih relatif kecil, sehingga jumlah DOC dan DOD yang dihasilkan belum mampu memenuhi permintaan pasar. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok-kelompok peternak unggas lokal yang mengusahakan pembibitan, namun masih sangat beragam kualitas bibit yang dihasilkan dan distribusi pasar yang masih bersifat lokal maupun regional.

Dukungan teknologi untuk mencapai sasaran produksi unggas lokal seperti yang diharapkan cukup banyak tersedia, baik dari institusi penelitian, perguruan tinggi maupun masyarakat penggemar unggas lokal. Koordinasi dan strategi penerapan teknologi agar efektif dan dapat diserap peternak memerlukan kelembagaan yang mampu berfungsi dengan baik. Pengembangan kelompok-kelompok peternak unggas lokal pada kawasan yang potensial perlu dilakukan. Hasil-hasil penelitian untuk mengembangkan jenis-jenis unggas lokal yang berproduksi tinggi yang sudah diperoleh perlu segera diikuti oleh penyebaran dan pengembangan pada masyarakat peternak unggas lokal. Sebagai contoh, Balai Penelitian Ternak telah menghasilkan ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB) hasil seleksi

berdasarkan kemampuan produksi telur yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ayam lokal lainnya. Penyebarluasan ayam lokal unggul ini masih terkendala oleh permasalahan penyediaan bibit, demikian pula halnya dengan ternak itik pedaging maupun petelur yang sudah dihasilkan.

Usaha pembibitan adalah usaha jangka panjang sehingga membutuhkan investasi cukup besar. Nilai investasi sub sektor peternakan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan besar (berdasarkan harga konstan tahun 2000) pada tahun 2009 mencapai Rp. 1,079 Trilyun. Hal ini mengalami penurunan sebesar Rp. 110 Milyar dibandingkan tahun 2008, dan sub sektor peternakan memiliki kontribusi investasi yang paling rendah dibandingkan dengan subsektor perkebunan, perikanan, tanaman bahan makanan, dan kehutanan. Investasi di sub sektor peternakan didominasi oleh usaha perunggasan (ayam ras), yakni sekitar 69%, dimana 54% bersumber dari modal dalam negeri (PMDN) dan sisanya adalah modal asing (PMA). Berbagai penyebab rendahnya kinerja investasi di subsektor peternakan telah banyak disampaikan, termasuk yang dikemukakan oleh Arifin (2012) untuk menemukan solusinya yaitu: (i) penciptaan iklim usaha kondusif, (ii) reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan, dan (iii) realisasi motivator dan fasilitator di daerah. Hasil *scooping meeting* juga menunjukkan bahwa rendahnya investor skala menengah pada pembibitan unggas lokal telah menyebabkan populasi stagnan, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan produksi DOC dan DOD.

## TAHAPAN KEGIATAN

Memperhatikan hal tersebut diatas, dalam rangka penciptaan iklim usaha yang kondusif serta perumusan kebijakan pendukung untuk meningkatkan pengembangan usaha pembibitan unggas lokal, maka Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan melalui Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Strategis Peternakan dan Veteriner menyelenggarakan *roundtable discussion* (RTD) tentang hal ini. Output yang diharapkan dari diskusi ini adalah rekomendasi tentang peningkatan kinerja investasi pada pengembangan usaha ternak unggas lokal pada sistem pembibitan. Diharapkan usaha ini dapat saling menguntungkan di antara pelaku usaha yang terintegrasi dari hulu ke hilir, sehingga dapat mengakselerasi pengembangan usaha pembibitan unggas lokal di Indonesia.

Narasumber kegiatan ini meliputi:

1. Direktur Perbibitan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan topik bahasan 'Program Pengembangan Pembibitan Unggas Lokal: Arah, *Roadmap*, Kelembagaan dan Pembiayaan'
2. Kepala Biro Hukum Kementerian Pertanian, dengan topik bahasan 'Prosedur usulan atas Perubahan Peraturan Presiden terkait dengan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal: Pembibitan dan Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya'
3. Direktur PT. Multi Unggul Sejahtera dengan topik bahasan 'Skala usaha, kelayakan ekonomik, dan kebutuhan investasi usaha pembibitan itik lokal'
4. Direktur PT. Ayam Kampung Indonesia dengan topik bahasan 'Skala usaha, kelayakan ekonomik dan kebutuhan investasi usaha pembibitan ayam lokal'



5. Ketua Kelompok Peternak Pembibitan Ayam Sentul Barokah, Ciamis dengan topik bahasan 'Model Usaha Berbasis Kelompok untuk Pengembangan Usaha Pembibitan Ayam Lokal'
6. Ketua Kelompok Tani Ternak Itik Bahana Putra Mandiri, Tasikmalaya, dengan topik bahasan 'Model Usaha Berbasis Kelompok untuk Pengembangan Usaha Pembibitan Ayam Lokal'
7. Prof (R) Dr. Sofyan Iskandar dan Dr. Hardi Prasetyo, Balai Penelitian Ternak dengan topik bahasan 'Prospek Penyiapan dan Penangkaran Unggas Lokal Terseleksi Hasil Riset atau Kerjasama Riset'.

Peserta diskusi keseluruhan berjumlah sekitar 45 orang yang berasal dari instansi terkait dan pelaku usaha unggas lokal di bidang pembibitan dan budidaya. Peserta ini berasal dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Biro Hukum Kementerian Pertanian, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Dinas Peternakan Propinsi dan Kabupaten/Kota, pengusaha dan kelompok peternak pembibitan dan budidaya unggas lokal, Asosiasi peternak unggas lokal, dan akademisi serta peneliti lingkup Badan Litbang Pertanian.

## **SASARAN DAN TUJUAN**

### **SASARAN**

Sasaran yang diharapkan dari diskusi ini adalah terimplementasikannya rekomendasi tentang peningkatan kinerja investasi dalam pengembangan usaha ternak unggas lokal pada sistem pembibitan. Diharapkan usaha ini dapat saling menguntungkan di antara pelaku usaha yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

### **TUJUAN**

Tujuan penyelenggaraan RTD ini adalah untuk mensintesis dan menganalisis alternatif/opsi kebijakan terkait dengan aspek investasi dalam rangka mengakselerasi pengembangan usaha pembibitan unggas lokal. Kegiatan ini juga akan mengidentifikasi beberapa instrumen kebijakan yang dapat diterapkan dari aspek pembibitan maupun investasi terkait dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

### **ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN UNGGAS LOKAL**

*Blue print* Kementerian Pertanian menyatakan bahwa pada tahun 2019, unggas lokal ditargetkan dapat memasok 25% dari total kebutuhan daging unggas nasional, setara dengan 400 – 450 juta DOC dan DOD per tahun, dimana 63% dari ayam lokal dan 37% dari itik. Hal ini perlu disikapi dengan upaya peningkatan usaha peternakan ayam dan itik lokal secara terencana dan mempunyai kelembagaan yang mantap. Ketersediaan bibit DOC dan DOD menjadi sangat penting untuk mencukupi kebutuhan usaha peternakan skala kecil maupun menengah. Hasil penelitian Balai

Penelitian Ternak menunjukkan bahwa galur ayam kampung unggul yang dikenal sebagai "Ayam Kampung Unggul Balitnak" (Ayam KUB) dan galur itik Mojosari-Alabio (MA) dan Peking-Mojosari putih (PMp) sudah siap untuk dikembangkan. Dengan demikian, keterlibatan usaha skala menengah dalam memproduksi DOC dan DOD dengan kualitas yang memenuhi standar adalah suatu keniscayaan. Upaya konkrit sangat diperlukan untuk mengoptimalkan potensinya dan menjadikan unggas lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Pemerintah telah memberikan perlindungan aspek hukum bagi pelaku usaha unggas lokal sebagaimana yang tertuang dalam berbagai regulasi. Hal ini diantaranya meliputi: (i) UU No 18/2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, (ii) Perpres No 36/2010 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka, (iii) PP No 48/2011 tentang sumberdaya genetik hewan dan perbibitan ternak, serta (iv) Permentan No.19/2008 tentang penetapan dan pelepasan rumpun unggas.

Dalam rangka mendorong penyediaan bibit unggas lokal yang berkualitas, telah dibangun beberapa balai pembibitan ternak unggul di Sumatera Selatan (Sembawa) dan Kalimantan Selatan (Pelaihari), yang diiringi dengan pembentukan unit pembibitan di daerah seperti di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Barat. Pemerintah juga telah memfasilitasi beberapa perusahaan swasta skala menengah untuk melakukan usaha pembibitan serta berbagai kelompok peternak di beberapa wilayah. Pada tahun 2012 telah diberikan masing-masing sejumlah 21 kelompok dan 19 kelompok untuk pembibitan ayam dan itik lokal, serta kepada 4 kelompok untuk penguatan UPTD unggas lokal. Hal ini pada tahun 2013, direncanakan meningkat masing-masing sebesar 4,3% dan 6% untuk kelompok peternak ayam dan itik lokal. Disamping itu, ketersediaan pakan yang berkualitas juga menjadi komponen yang penting, terutama berkaitan dengan harga yang harus terjangkau oleh peternak dan dapat mendatangkan keuntungan, mengingat bahwa lebih dari 70% biaya produksi adalah biaya pakan.



## SKALA USAHA DAN KEBUTUHAN INVESTASI

Usaha unggas lokal perlu didorong untuk menjadi suatu industri dengan orientasi komersial yang menguntungkan. Usaha pembibitan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan industri unggas lokal diimbangi dengan usaha budidaya dan pemasaran. Usaha ini dapat berupa usaha pembibitan model kelompok maupun usaha komersial. Industri menengah usaha pembibitan ayam lokal minimal berskala 9 ribu ekor induk *parent stock* yang dapat dilakukan melalui usaha mandiri ataupun kelompok. Pada usaha mandiri dilengkapi dengan mesin tetas, sedangkan pada usaha kelompok dilakukan dengan sewa mesin tetas. Rata-rata daya tetas sebesar 86%, maka usaha ini menghasilkan 20 ribu DOC/minggu dengan kebutuhan investasi awal tidak lebih dari Rp. 1 Milyar. Rata-rata keuntungan yang diperoleh pada skala usaha ini sekitar Rp.2000/ekor DOC. Kunci keberhasilan usaha pembibitan ini meliputi: (i) tenaga kerja terampil, (ii) ketersediaan listrik dan air, serta (iii) lingkungan yang aman. Disarankan untuk menggunakan mesin tetas digital dengan kapasitas kecil karena pemakaian listrik yang lebih efisien dengan daya tetas relatif bagus.

Usaha pembibitan itik lokal terdiri atas 5 pelaku usaha, yakni: (i) pembibit tanpa indukan, (ii) pembibit dengan lahan terbatas, (iii) pembibit tanpa mesin tetas, (iv) pembibit dengan fasilitas lengkap, dan (v) pembibit mediator. Pelaku usaha ini terbagi berdasarkan asset yang dimiliki, sehingga melibatkan beberapa divisi usaha lainnya kecuali pada pembibit dengan fasilitas lengkap. Minimal skala usaha pembibitan itik lokal adalah 8000 ekor *parent stock* yang dapat menghasilkan 2000 DOD/minggu. Kebutuhan investasi awal mencapai Rp. 1,1 Milyar untuk penyediaan kandang (starter, grower, layer dan kelola limbah), mesin tetas (mesin setter), fasilitas penunjang (instalasi listrik dan air, gudang pakan, kantor administrasi, ruang mesin tetas), DOD *parent stock*, serta peralatan pakan, vitamin dan obat. Kebutuhan investasi lanjutan didominasi

oleh biaya pakan, disamping aspek distribusi (kemitraan, agen, media) dan perbaikan fasilitas.

Di tingkat peternak pembibit, skala minimal yang dianggap menguntungkan adalah 100 ekor induk/peternak yang dikelola dalam suatu kelompok. Kebutuhan investasi untuk ayam lokal pada usaha ini mencapai Rp. 16 juta/100 ekor induk dengan 170 ekor DOC yang dihasilkan dalam waktu 2 bulan. Rata-rata fertilitas dan daya tetas yang dihasilkan relatif tinggi, masing-masing adalah 85% dan 75%.

## **PELUANG PENGEMBANGAN USAHA PEMBIBITAN**

Pemerintah telah memberikan dukungan dan perlindungan terhadap usaha pengembangan ayam lokal. Perpres RI No 36/2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan, menyatakan bahwa di Bidang Penanaman Modal, seperti yang tercantum dalam Lampiran II Bidang Pertanian pada No 6, dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 01450 menyatakan "*pembibitan dan budidaya ayam buras serta persilangannya termasuk dalam daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dicadangkan untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi*". Selanjutnya, UU RI Nomor 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan bahwa salah satu kriteria usaha mikro, kecil dan menengah adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta, Rp. 500 juta dan Rp. 10 Milyar berturut-turut untuk usaha mikro, kecil dan menengah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kenyataan di lapang menunjukkan bahwa regulasi tersebut tidak akan menjadi penghambat dan kendala dalam mendorong pengembangan usaha pembibitan unggas lokal. Hal tersebut hanya mengatur untuk komoditas ayam buras, sehingga tidak berlaku bagi usaha pembibitan itik lokal. Estimasi asosiasi unggas lokal menunjukkan bahwa dengan batasan kekayaan bersih sejumlah



Rp.10 Milyar, maka skala usaha pembibitan ayam lokal dapat mencapai 125 ribu ekor *parent stock*, yang masih sangat jauh dari kondisi riil yang ada. Oleh karenanya, regulasi tersebut dipandang masih tepat untuk dilaksanakan dan diharapkan dapat membantu para pengusaha unggas lokal skala mikro, kecil dan menengah, termasuk peternak dan kelompok peternak budidaya.

Peluang ekspansi usaha pembibitan unggas lokal masih sangat besar yang diindikasikan dengan waktu yang relatif cukup lama untuk dapat memperoleh DOC/DOD *final stock*. Produk unggas lokal dicirikan dengan *public goods* yang unik karena cita rasa dan tekstur berbeda, sehingga menjadi memberikan preferensi tersendiri bagi konsumen. Oleh karena itu, produk unggas lokal memiliki pangsa pasar yang berbeda dan mengakibatkan harga produk yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan produk ayam ras.

Pengembangan riset dan inovasi teknologi berkelanjutan diharapkan dapat memecahkan permasalahan teknis di lapang, seperti relatif masih rendahnya produktivitas telur tetas (60%) dan produktivitas mesin tetas (50%). Demikian pula halnya dengan tingkat kematian induk pada usaha itik lokal yang masih cukup tinggi sehingga berpengaruh terhadap pasokan DOD. Belum terlaksananya dengan baik sistem biosekuriti menjadi tantangan tersendiri, dimana berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan peternak yang relatif masih rendah terhadap hal ini. Penerapan *good breeding practices* harus benar-benar dipahami dan dapat diimplementasikan dengan benar oleh peternak pembibit.

Kendala non teknis ditengarai oleh tidak mudahnya akses terhadap sistem pembiayaan usaha unggas lokal, utamanya bagi peternak dan atau kelompok peternak yang tidak memiliki agunan jika harus berhubungan dengan sistem kredit perbankan. Tata niaga distribusi pemasaran DOD dipandang masih memerlukan waktu yang relatif lama karena struktur pasar dan sarana yang belum memadai. Program penangkaran sumber daya genetik (SDG) lokal (termasuk

ternak unggas) yang dilakukan oleh lembaga riset belum sepenuhnya mendapat apresiasi dari pemerintah. Belum ada sistem insentif bagi masyarakat penangkar SDG lokal yang dapat memotivasi untuk pengembangan usaha pelestarian plasma nutfah nasional.

## **ANALISIS INVESTASI USAHA PEMBIBITAN**

Dalam usaha pembibitan unggas lokal, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan pelaku usaha untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi guna menambah kemampuan memproduksi bibit DOC dan atau DOD yang dihasilkan. Skala usaha, tingkat suku bunga, produktivitas ternak dan efisiensi mesin tetas merupakan faktor yang sangat menentukan terhadap tingkat pengembalian investasi usaha tersebut. Hal-hal ini yang akan menentukan ramalan keuntungan usaha pembibitan terhadap investasi yang dikeluarkan. Tingkat suku bunga merupakan faktor yang sangat dominan didalam menentukan jumlah investasi. Para pelaku usaha hanya akan melaksanakan keinginan untuk melakukan penanaman modal apabila tingkat pengembalian modalnya, yaitu persentasi keuntungan neto dari modal yang diperoleh, akan lebih besar dari tingkat suku bunga.

Estimasi kebutuhan investasi masing-masing untuk usaha pembibitan ayam dan itik lokal disajikan secara rinci pada Tabel 1 dan Tabel 2. Skala usaha awal adalah 1000 ekor ayam dan itik lokal dengan periode waktu selama 3 tahun dengan suku bunga komersial sebesar 14%/tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa investasi awal yang diperlukan untuk usaha pembibitan ayam lokal mencapai Rp.837 juta, sedangkan hal tersebut untuk itik mencapai Rp.868 juta. Kriteria investasi yang digunakan adalah nilai *net present value* (NPV), nisbah *revenue over cost* (R/C) dan *internal rate of return* (IRR), dimana untuk ayam lokal secara berturut-turut adalah 138.217.494; 1,186 dan 34,45%. Hal tersebut pada usaha



pembibitan itik lokal masing-masing adalah 87.783.286; 1,114 dan 25,13%. Berdasarkan estimasi ini dinyatakan bahwa usaha pembibitan ayam dan itik lokal layak untuk dikembangkan mengingat  $NPV > 0$ ,  $R/C > 1$  dan  $IRR > \text{discount rate}$ , dalam hal ini adalah 14%.

**Tabel 1.** Analisis investasi usaha pembibitan ayam lokal (Rp. Ribu)

| Tahun ke– | Penerimaan kotor | Biaya usaha itik  |          |           | DF 14% | Present Value |           |             |
|-----------|------------------|-------------------|----------|-----------|--------|---------------|-----------|-------------|
|           |                  | Angsuran pinjaman |          | Total     |        | Revenue       | Cost      | Net         |
|           |                  | Pokok             | Bunga    |           |        |               |           |             |
| 0         | 32.400           | 250.000           | 44.003,8 | 294.003,8 | 1,000  | 32.400        | 294.003,8 | (261.603,8) |
| 1         | 335.664          | 250.000           | 28.927,6 | 278.927,6 | 0,877  | 294.442,1     | 244.673,3 | 49.768,7    |
| 2         | 335.664          | 250.000           | 13.851,4 | 263.851,4 | 0,769  | 258.282,5     | 203.025,1 | 55.257,4    |
| 3         | 436.752          | –                 | –        | –         | 0,675  | 294.795,1     | –         | 294.795,1   |
|           | 1.140.480        | 750.000           | 86.782,9 | 836.782,9 |        | 879.919,8     | 741.702,3 | 138.217,4   |
|           |                  |                   |          |           |        |               | NPV =     | 138.217.494 |
|           |                  |                   |          |           |        |               | R/C =     | 1,186       |
|           |                  |                   |          |           |        |               | IRR =     | 34.45       |

**Tabel 2.** Analisis investasi usaha pembibitan itik lokal (Rp. Ribu)

| Tahun ke– | Penerimaan kotor | Biaya usaha itik  |           |           | DF 14% | Present Value |           |             |
|-----------|------------------|-------------------|-----------|-----------|--------|---------------|-----------|-------------|
|           |                  | Angsuran pinjaman |           | Total     |        | Revenue       | Cost      | Net         |
|           |                  | Pokok             | Bunga     |           |        |               |           |             |
| 0         | 29.700           | 250.000           | 53.211,2  | 303.211,2 | 1,000  | 29.700        | 303.211,2 | (273.511,2) |
| 1         | 314.820          | 250.000           | 39.362,4  | 289.362,4 | 0,877  | 276.157,8     | 253.826,7 | 22.331,1    |
| 2         | 314.820          | 250.000           | 25.513,7  | 275.513,7 | 0,769  | 242.243,7     | 211.998,8 | 30.244,9    |
| 3         | 457.380          | –                 | –         | –         | 0,675  | 308.718,4     | –         | 308.718,4   |
|           | 1.116.720        | 750.000           | 118.087,4 | 868.087,4 |        | 856.820,1     | 769.036,8 | 87.783,2    |
|           |                  |                   |           |           |        |               | NPV =     | 87.783.286  |
|           |                  |                   |           |           |        |               | R/C =     | 1,114       |
|           |                  |                   |           |           |        |               | IRR =     | 25,13       |

Investasi pemerintah utamanya terfokus pada kegiatan promosi dalam upaya meningkatkan konsumsi daging dan telur yang aman, sehat, utuh dan halal. Pelayanan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat sejak usia dini tentang manfaat mengkonsumsi daging dan telur perlu dilakukan secara konsisten. Peran pemerintah juga diharapkan dalam aspek penelitian dan pengembangan, utamanya dalam hal menyediakan alternatif bahan baku pakan

berdasarkan sumberdaya lokal. Demikian pula halnya dengan identifikasi dan evaluasi untuk pengembangan unggas lokal yang resisten terhadap penyakit, serta peningkatan mutu genetik.

## **LANGKAH TINDAK LANJUT**

Program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja usaha unggas lokal (utamanya ayam) sudah cukup banyak dan masih akan terus berkembang di masa-masa mendatang. Program tersebut pada umumnya berbasis kelompok yang bertujuan untuk pemberdayaan peternak. Keberadaan dan aktivitas kelompok ternak pembibit yang dikelola masyarakat menjadi sangat penting dan peran aktif pemerintah sangat diperlukan melalui pembinaan dan pendampingan intensif untuk meminimalkan keterbatasan yang dimiliki oleh peternak. Penumbuhan dan pembinaan kelompok sangat diperlukan dalam upaya mengembangkan kelompok-kelompok peternak pembibit. Anggota kelompok yang sudah mapan dari kelompok binaan awal dapat keluar dari kelompok tersebut dan membentuk kelompok baru dengan peserta lain. Hal ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat dijadikan suatu wilayah sebagai sentra/produsen bibit unggas lokal.

Pengusaha pembibitan skala menengah unggas lokal juga perlu didorong untuk lebih menjamin ketersediaan pasokan DOC dan DOD yang masih belum dapat memenuhi permintaan pasar. Pelaku usaha ini dapat bermitra dengan peternak maupun kelompok peternak dalam melakukan bisnisnya. Perkembangan terakhir menyebutkan bahwa hanya terdapat 3 perusahaan skala menengah penghasil DOC ayam lokal, dan lebih sedikit lagi bagi pembibit itik lokal. Dengan 3 pengusaha pembibitan yang ada, produksi DOD yang dihasilkan baru mencapai 1% dari target 400 – 450 juta ekor pada tahun 2019.



Hasil uji multilokasi dari lembaga riset terkait dengan peningkatan mutu genetik unggas lokal diharapkan sesuai dengan produk yang diinginkan oleh pelaku usaha. Pengujian hasil seleksi dapat langsung dirasakan oleh pengguna melalui pengamatan biologis yang memenuhi kaidah-kaidah penelitian selama satu periode produksi. Pada tahap lebih lanjut, dapat dilakukan pengamatan terhadap preferensi mitra kerjasama yang merepresentasikan permintaan pasar terhadap produk dimaksud secara nasional. Hal ini juga dapat dikembangkan jejaring (lembaga pemerintah dan swasta) dalam upaya sistem insentif bagi masyarakat penangkar SDG unggas lokal, sehingga terjadi *effect multiplier* yang cukup signifikan sebagai penyedia *final stock* DOC dan DOD yang berkesinambungan.

### **REKOMENDASI KEBIJAKAN**

Hasil diskusi menunjukkan bahwa usaha pembibitan itik lokal sangat layak dan mempunyai peluang pasar yang sangat besar dengan *coverage* pasar di seluruh Indonesia. Keuntungan usaha dapat mencapai Rp. 2000/ekor pada harga jual Rp. 5500/ekor dengan produktivitas telur induk 60%, produktivitas mesin tetas 50% dan mortalitas mencapai 20%. Disamping itu, keberhasilan kelompok peternak ayam buras "Barokah" menunjukkan bahwa model usaha berbasis kelompok dalam pengembangan usaha pembibitan ayam lokal akan mampu mendorong kelompok lain untuk dapat berkembang.

Dalam rangka mempercepat pengembangan unggas lokal (ayam dan itik), beberapa opsi kebijakan berikut ini dipandang strategis:

1. Perhatian pemerintah yang konsisten sangat diperlukan terhadap pemanfaatan dan pelestarian SDG unggas lokal, karena SDG unggas lokal merupakan potensi yang harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan daging (dan telur) dalam negeri.
2. Pemerintah perlu mendukung berbagai upaya ke arah seleksi dan peningkatan mutu genetik unggas lokal, termasuk didalamnya aspek kelembagaan dan akses peternak terhadap pembiayaan.
3. Hasil rekonsiliasi dan verifikasi kebutuhan investasi bagi pengembangan usaha pembibitan unggas lokal, maka dukungan pemerintah dan perlindungan usaha ini sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan kriteria pemilikan kekayaan bersih paling banyak berturut-turut adalah Rp.50 juta, Rp.500 juta dan Rp.10 Milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, masih relevan untuk dilaksanakan.
4. Dukungan pemerintah perlu segera dilakukan dalam penyediaan sistem insentif bagi masyarakat penangkar SDG unggas lokal dalam rangka melindungi dan memberdayakan peternak untuk mempercepat peningkatan populasi.
5. Dukungan pemerintah kepada peternak unggas lokal dalam pelaksanaan *good breeding practices* dan *good farming practices* untuk menjamin keberlangsungan usaha pembibitan ayam lokal dapat dimulai pada kelompok berkapasitas 3000 ekor/kelompok yang mesin tetas bersama, serta penyelenggaraan budidaya dan pemasaran yang baik.
6. Kebutuhan bibit itik lokal yang belum dapat dipenuhi baik dari jumlah maupun kualitas, maka kelembagaan tataniaga yang menjamin pemasaran produksi itik dengan kualitas standar

dengan tingkat harga yang menguntungkan harus segera diwujudkan.

7. Dukungan teknologi dalam pengembangan unggas lokal diharapkan dapat mempercepat pencapaian keberhasilan di tingkat peternak, agar kesediaan swasta sebagai penangkar pada skala lebih besar dapat membantu mempercepat pengembangan unggas lokal.

## MATRIKS RENCANA TINDAK KINERJA INVESTASI PEMBIBITAN MENUJU KEMANDIRIAN USAHA UNGGAS LOKAL

| No   | Rencana Tindak  | Keluaran  | Sasaran Waktu | Penanggung Jawab                                   |
|--|---|---|---------------|--|
| <b>I. Penyusunan <i>Roadmap</i> Pencapaian Status Bebas AI pada unggas</b> |   |   |               |  |
| 1  | Pelaksanaan penjarangan penangkar usaha kecil dan menengah bagi ketersediaan bibit unggas lokal | Tersedianya bibit DOC dan DOD sesuai permintaan pasar yang berkelanjutan                        | 2012 – 2013   | Himpuli, Pengusaha skala menengah, Pemda           |
| 2  | Intensifikasi pemanfaatan dan pelestarian SDG unggas lokal sesuai potensi wilayah               | Peningkatan penggunaan SDG unggas lokal sebagai penyedia DOC dan DOD                            | 2012 – 2013   | Ditjen PKH, Pemda, Himpuli                         |
| 3  | Penyediaan sistem insentif bagi penangkar penghasil bibit unggas lokal                          | Peningkatan motivasi untuk berusaha unggas lokal  | 2012 – 2014   | Ditjen PKH, Himpuli, Pemda                         |
| 4  | Program seleksi dan peningkatan mutu genetik unggas lokal sesuai permintaan pasar               | Tersedianya DOC dan DOD sesuai standar yang dapat memenuhi permintaan pasar                     | 2012 – 2014   | Pusat-pusat penelitian, Perguruan Tinggi           |
| 5  | Teknologi peningkatan daya tetas unggas lokal   | Peningkatan jumlah produksi DOC dan DOD unggas lokal  | 2012 – 2014   | Pusat-pusat penelitian, Perguruan Tinggi           |
| 6  | Penyediaan calon induk unggas lokal berproduksi tinggi  | Terjaminnya ketersediaan indukan penghasil telur  | 2012 – 2014   | Pusat-pusat penelitian, Perguruan Tinggi, Himpuli. |
| 7  | Formulasi pakan unggas lokal indukan dan pembesaran sesuai kebutuhan                            | Standar kualitas pakan indukan ( <i>starter</i> ) dan pembesaran ( <i>grower</i> ) unggas lokal | 2012 – 2014   | Pusat-pusat penelitian, Perguruan Tinggi           |

**II. Upaya Peningkatan Investasi Usaha Pembibitan**

|   |  |  |             |  |
|---|--|--|-------------|--|
| 1 | Inventarisasi kesiapan industri pembibitan unggas lokal                      | Teridentifikasinya usaha kecil-menengah dalam rangka mengakselerasi usaha pembibitan | 2012 – 2013 | Himpuli, pengusaha skala menengah, Pemda |
| 2 | Kemudahan perijinan lalu lintas distribusi DOC dan DOD ke daerah             | Menurunnya ekonomi biaya tinggi untuk memperluas <i>market coverage</i> ke daerah    | 2012 – 2013 | Dit. Perhubungan, Pemda                  |
| 3 | Perbaikan sarana tata niaga dalam jalur distribusi DOC dan DOD               | Tepat waktu dan sasaran dalam distribusi DOC dan DOD                                 | 2012 – 2013 | Dit. Perhubungan, Pemda                  |
| 4 | Inovasi mesin tetas berskala menengah yang hemat energi dan ramah lingkungan | Penurunan biaya produksi DOC dan DOD pada investasi awal                             | 2012 – 2013 | Pengusaha skala menengah, perekayasa     |
| 5 | Kemudahan akses dalam sumber pembiayaan dengan tingkat suku bunga terjangkau | Peningkatan jumlah kredit usaha kecil dan menengah jangka panjang                    | 2012 – 2014 | Perbankan, Ditjen PKH, Pemda             |

**III. Analisis Daya Saing Unggas Lokal**

|   |  |   |             |   |
|---|--|---|-------------|---|
| 1 | Inovasi bahan baku pakan yang dapat mengurangi ketergantungan bahan baku impor | Penggunaan bahan baku pakan alternatif yang berbahan baku lokal | 2012 – 2014 | Lembaga penelitian, Perguruan Tinggi, Pengusaha skala menengah, Himpuli |
| 2 | Pemantauan perkembangan harga bibit unggas lokal                               | Informasi dinamika perubahan harga bibit unggas lokal           | 2012 – 2014 | Ditjen PKH, Ditjen P2HP, Pusat-pusat penelitian                         |



|   |   |   |             |   |
|---|---|---|-------------|---|
| 3 | Penetapan kelayakan usaha pembibitan unggas lokal dan pengembangannya   | Analisis kelayakan usaha unggas lokal         | 2012 – 2013 | PSEKP, Pusat-pusat penelitian, Perguruan Tinggi |
| 4 | Monitoring perubahan pasokan dan permintaan terhadap bibit unggas lokal | Informasi kebutuhan produk bibit unggas lokal | 2012 – 2014 | Pusat-pusat penelitian, Ditjen P2HP, PSEKP      |

#### **IV. Kelembagaan dan Dukungan Kebijakan**

|   |   |   |             |  |
|---|---|---|-------------|--|
| 1 | Sinkronisasi koordinasi pembinaan usaha kecil dan menengah                  | Rekomendasi kebijakan pembinaan usaha kecil dan menengah di bidang unggas lokal | 2012 – 2014 | Ditjen PKH, Kemen BUMN, BUMD, Lembaga penelitian               |
| 2 | Peningkatan jejaring kemitraan usaha pembibitan dan pembesaran unggas lokal | Peningkatan produksi unggas lokal di berbagai daerah                            | 2012 – 2014 | Lembaga penelitian, Perguruan Tinggi Perusahaan swasta, BUMN/D |
| 3 | Peningkatan penyuluhan usaha kecil menengah bidang unggas lokal             | Terjaminnya model-model pengembangan unggas lokal                               | 2012 – 2014 | Ditjen PKH, Badan SDMP, Pemda                                  |
| 4 | Jaminan hukum usaha pembibitan unggas lokal skala kecil-menengah            | Swasta/BUMN yang tertarik untuk mengembangkan usaha unggas lokal                | 2012 – 2014 | Swasta/BUMN Perbankan, Pemda                                   |



## DAFTAR BACAAN

- Arifin, Bustanul. 2012. Solusi rendahnya investasi sektor peternakan. Trobos Edisi 152, Mei 2012.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. BKPM dukung investasi sub sektor peternakan.
- Ayam Kampung Indonesia. 2012. Skala usaha, kelayakan ekonomik, dan kebutuhan investasi usaha pembibitan ayam lokal. Makalah disampaikan dalam *Roundtable discussion* tentang Kinerja Investasi dan Aspek Perbibitan Unggas Lokal di Indonesia. Tasikmalaya, 13 Juli 2012. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor.
- Bahana Putra Mandiri. 2012. Model usaha berbasis kelompok untuk pengembangan usaha pembibitan itik lokal. Makalah disampaikan dalam *Roundtable discussion* tentang Kinerja Investasi dan Aspek Perbibitan Unggas Lokal di Indonesia. Tasikmalaya, 13 Juli 2012. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor.
- Diana, Edi. 2012. Model usaha berbasis kelompok untuk pengembangan usaha pembibitan ayam lokal. Makalah disampaikan dalam *Roundtable discussion* tentang Kinerja Investasi dan Aspek Perbibitan Unggas Lokal di Indonesia. Tasikmalaya, 13 Juli 2012. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor.
- Direktorat Perbibitan Ternak, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2012. Program pengembangan pembibitan unggas lokal. Makalah disampaikan dalam *Roundtable discussion* tentang Kinerja Investasi dan Aspek Perbibitan Unggas Lokal di Indonesia. Tasikmalaya, 13 Juli 2012. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor.

- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2011. Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2011. Kementerian Pertanian RI, Jakarta.
- Iskandar, Sofyan. 2006. Strategi pengembangan ayam lokal. *Wartazoa*: 16 (3) 2006. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor.
- Iskandar, Sofyan. 2012. Prospek, penyiapan dan penangkaran ayam lokal terseleksi hasil riset atau kerjasama riset. Makalah disampaikan dalam *Roundtable discussion* tentang Kinerja Investasi dan Aspek Perbibitan Unggas Lokal di Indonesia. Tasikmalaya, 13 Juli 2012. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor.
- Liem, Andy. 2012. Outlook usaha pembibitan itik lokal. Makalah disampaikan dalam *Roundtable discussion* tentang Kinerja Investasi dan Aspek Perbibitan Unggas Lokal di Indonesia. Tasikmalaya, 13 Juli 2012. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor.
- Prasetyo, Hardi. 2012. Pembibitan unggas lokal. Makalah disampaikan dalam *Roundtable discussion* tentang Kinerja Investasi dan Aspek Perbibitan Unggas Lokal di Indonesia. Tasikmalaya, 13 Juli 2012. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor.
- Prasetyo, Hardi. 2006. Strategi dan peluang pengembangan prmbibitan ternak itik. *Wartazoa*: 16 (3) 2006. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. 2011. Rumusan *Scoping Study Outlook* Bisnis Unggas Lokal di Indonesia. Cisarua-Bogor, 13 Desember 2011.

Ramlan, Pujiyanto. 2012. Prosedur usulan atas perubahan Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Makalah disampaikan dalam *Roundtable discussion* tentang Kinerja Investasi dan Aspek Perbibitan Unggas Lokal di Indonesia. Tasikmalaya, 13 Juli 2012. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor.

## **TIM KAJIAN ANTISIPATIF DAN RESPONSIF KEBIJAKAN STRATEGIS PETERNAKAN DAN VETERINER**

1. Prof. (R) Dr. Tjeppy D. Soedjana, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor
2. Prof. (R) Dr. Subandriyo, Balai Penelitian Ternak, Ciawi – Bogor
3. Prof. (R) Dr. Kusuma Diwyanto, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor
4. Prof. (R) Dr. Syamsul Bahri, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor
5. Prof. (R) Dr. Budi Haryanto, Balai Penelitian Ternak, Ciawi – Bogor
6. Prof. (R) Dr. Ismeth Inounu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor
7. Dr. Agus Wiyono, Balai Besar Penelitian Veteriner, Bogor
8. Dr. Atien Priyanti, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor
9. Hasanatun Hasinah, SPt., MP., Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor

## **TIM PERUMUS**

1. Prof. (R) Dr. Tjeppy D. Soedjana – Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
2. Prof. (R) Dr. Budi Haryanto - Balai Penelitian Ternak
3. Dr. Atien Priyanti – Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
4. Hasanatun Hasinah, SPt., MP. – Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

# LAMPIRAN

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase by 1.5 billion (United Nations 1994).

There is a growing awareness of the need to develop a new generation of young people who are able to deal with the challenges of the 21st century. This has led to a number of initiatives aimed at improving the quality of education and training for young people. One of the most important of these is the development of a new curriculum that is more relevant to the needs of the 21st century.

The new curriculum is based on a number of key principles. First, it is more relevant to the needs of the 21st century. This means that it focuses on the skills and knowledge that young people need to be able to deal with the challenges of the 21st century. Second, it is more interactive. This means that young people are encouraged to participate in their learning and to work together to solve problems. Third, it is more flexible. This means that young people are encouraged to learn at their own pace and to follow their own interests.

The new curriculum is also more holistic. This means that it takes into account the whole person, not just their academic abilities. It also takes into account the social and emotional needs of young people. This is done by encouraging young people to develop their self-esteem and to build positive relationships with others. The new curriculum is also more inclusive. This means that it is designed to be accessible to all young people, regardless of their background or abilities.

The new curriculum is a major step forward in the development of education and training for young people. It is a curriculum that is more relevant, more interactive, more flexible, more holistic, and more inclusive. It is a curriculum that is designed to help young people to develop the skills and knowledge that they need to be able to deal with the challenges of the 21st century.

The new curriculum is a major step forward in the development of education and training for young people. It is a curriculum that is more relevant, more interactive, more flexible, more holistic, and more inclusive. It is a curriculum that is designed to help young people to develop the skills and knowledge that they need to be able to deal with the challenges of the 21st century.

The new curriculum is a major step forward in the development of education and training for young people. It is a curriculum that is more relevant, more interactive, more flexible, more holistic, and more inclusive. It is a curriculum that is designed to help young people to develop the skills and knowledge that they need to be able to deal with the challenges of the 21st century.

The new curriculum is a major step forward in the development of education and training for young people. It is a curriculum that is more relevant, more interactive, more flexible, more holistic, and more inclusive. It is a curriculum that is designed to help young people to develop the skills and knowledge that they need to be able to deal with the challenges of the 21st century.



## **PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN UNGGAS LOKAL**

*Direktorat Perbibitan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan*

### **RINGKASAN**

Keberadaan unggas lokal tersebar dan menyatu dengan kehidupan masyarakat pedesaan, serta menjadi sumber protein hewani (telur dan daging). Kontribusi nasional untuk produksi daging unggas lokal mencapai sekitar 19% dan sebesar 31% untuk produk telur. Pemerintah telah memberikan beberapa perlindungan dalam rangka mengakselerasi peningkatan produk daging dan telur unggas lokal. Hal ini terkait dengan beberapa regulasi yang telah dikeluarkan, diantaranya: (i) UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, (ii) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup & Terbuka, (iii) Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, (iv) Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun Unggas, (v) Peraturan Menteri Pertanian No. 49/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Ayam yang Baik, (vi) Peraturan Menteri Pertanian No. 237/Kpts/PD.430/6/2005 tentang Pedoman Pembibitan Itik yang Baik, dan (vii) Keputusan Dirjen Peternakan tentang Petunjuk Teknis Pengembangbiakan Rumpun/Galur Ternak.

Arah pengembangan usaha pembibitan unggas lokal meliputi: (i) Pelestarian (konservasi), dan status populasi tidak aman, (ii) Program seleksi untuk menghasilkan bibit unggul, (iii) Penerapan program persilangan yang terarah, (iv) Pengembangbiakan dan upaya multiplier, dan (iv) Penerapan *good breeding practices*. Diharapkan seluruh *stakeholders* dapat mendukung upaya pengembangan usaha pembibitan unggas lokal ini mulai dari masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, swasta dan pelaku usaha

serta kelompok peternak maupun gabungan kelompok peternak. Pengembangan usaha pembibitan ini diharapkan dapat mengikutsertakan peran kelompok dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Beberapa program aksi ditujukan dalam hal kegiatan pengawalan pembibitan unggas lokal, penguatan unit pembibitan daerah (ayam dan itik), program seleksi dan peningkatan mutu genetik di Balai Pembibitan Ternak Unggul melalui pendampingan para pakar.

**PROSEDUR USULAN ATAS PERUBAHAN PERATURAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2010  
TENTANG  
DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG  
USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG  
PENANAMAN MODAL**

**Pujianto Ramlan, SH**

*Biro Hukum dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian  
Pertanian*

**RINGKASAN**

Perubahan perundang-undangan pada prinsipnya dapat dilekukan dengan cara menyisipkan atau menambah materi ke dalam perundang-undangan tersebut, atau menghapus dan atau mengganti sebagian materi perundang-undangan dimaksud. Perubahan perundang-undangan dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat maupun dalam bentuk kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. Jika perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, perundang-undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat perundang-undangan yang diubah.

Pada dasarnya batang tubuh perundang-undangan perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi. Jika dalam perundang-undangan ditambah atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c yang diletakkan di antara tanda baca kurung ( ). Jika dalam suatu perundang-undangan

dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberikan keterangan dihapus. Jika suatu perubahan perundang-undangan mengakibatkan sistematika perundang-undangan berubah, maupun materi perundang-undangan berubah lebih dari 50%, atau esensinya berubah, maka perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut. Jika perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna, sebaiknya perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan dengan mengadakan penyesuaian pada: (i) urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir, (ii) penyebutan, dan (iii) ejaan, jika perundang-undangan yang diubah masih tertulis ejaan lama.

Mekanisme kerja penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.617/Kpts/Hk.060/12/2003 adalah: Unit Eselon I/pemrakarsa menyampaikan draft perundangan-undangan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal cq. Unit Hukum mengkaji dari aspek hukum dan mengkoordinasikan pembahasan antar Eselon I terkait apabila diperlukan, dan jika ada kesepakatan konsep diajukan kepada Menteri Pertanian untuk pengesahan. Skala prioritas didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan meliputi: (i) merupakan perintah dari UU, (ii) merupakan perintah dari Peraturan Pemerintah, (iii) yang terkait dengan pelaksanaan UU lain, (iv) mendorong percepatan pembangunan pertanian, (v) menyangkut perubahan terhadap Peraturan Menteri Pertanian, (vi) mendukung pemulihan dan pembangunan pertanian, serta (vii) secara langsung menyentuh kepentingan petani untuk memulihkan dan meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat.



## SKALA USAHA, KELAYAKAN EKONOMIK, DAN KEBUTUHAN INVESTASI USAHA PEMBIBITAN AYAM LOKAL

*PT. Ayam Kampung Indonesia, Sukabumi, Jawa Barat*

### RINGKASAN

Dilaporkan bahwa ayam kampung menempati populasi terbanyak di antara ayam lokal lain, dimana hal ini mengindikasikan bahwa ayam kampung cukup mendapat tempat dan diapresiasi dengan baik di masyarakat. Salah satu daya tarik adalah harga jual per satuan produk ayam kampung yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ayam ras. Sesuai dengan *good breeding practice*, bibit yang digunakan oleh PT. Ayam Kampung Indonesia (PT. AKI) harus memenuhi standar mutu dan kualitas yang telah ditetapkan. Jejaring usaha dan distribusi pemasaran usaha pembibitan ayam lokal adalah PT. AKI sebagai penjamin supply DOC dan *technical support*, kelompok peternak dan pendampingan teknis sebagai pelaku budidaya sesuai *good farming practices* dengan control dari asosiasi, dan tempat pemotongan ayam yang dilakukan oleh kepala kelompok peternak sebagai pemeran aspek hilir (pasar).

Pelatihan dan promosi dilakukan bersama-sama antara PT. AKI, kelompok dan pelaku pasar diiringi dengan survey dan analisa secara regular. Pemasaran produk PT. Aki dan jaringannya meliputi konsumen restoran (30%), supermarket (40%) dan pasar (30%). Operasional usaha pembibitan ayam lokal minimal dengan skala usaha 9000 ekor *parent stock* dengan sistem manajemen 1 lokasi dan 3 kelompok peternak pembibitan. Mesin tetas dilakukan dengan digital karena lebih hemat listrik dengan rata-rata daya tetas mencapai 86%. Investasi awal yang diperlukan sekitar Rp. 880 juta untuk 1 lokasi pembibitan dan masing-masing Rp. 160 juta untuk kelompok peternak, dimana mesin tetas adalah sewa. Laba bersih yang diperoleh dalam periode 66 minggu adalah Rp. 2100/ekor dan

Rp. 1840/ekor, masing-masing pada sistem 1 lokasi pembibitan dan 3 kelompok peternak. Kunci keberhasilan produksi di PT. AKI adalah tenaga kerja yang terlatih, listrik cukup, air bagus, dan lingkungan aman.

## **SKALA USAHA, KELAYAKAN EKONOMIK, DAN KEBUTUHAN INVESTASI USAHA PEMBIBITAN ITIK LOKAL**

**Andy Liem**

*PT. Multi Unggul Sejahtera, Karawang, Jawa Barat*

### **RINGKASAN**

Pembibit itik lokal dikategorikan dalam 5 pelaku usaha, yaitu: (i) Pembibit tanpa indukan, (ii) Pembibit dengan lahan terbatas, (iii) Pembibit tanpa mesin tetas, (iv) Pembibit dengan fasilitas lengkap, dan (v) Pembibit mediator. Kebutuhan investasi awal dipengaruhi oleh faktor-faktor: mesin tetas, kandang, pakan, obat dan vitamin, DOD *parent stock* dan fasilitas penunjang lainnya seperti ruang mesin tetas, kantor administrasi, gudang pakan dan instalasi listrik serta air. Proporsi masing-masing komponen dalam investasi awal adalah kandang (15%), DOD PS (1%), pakan, vitamin, dan obat (11%), peralatan pakan (1%), mesin tetas (28%), laboratorium (9%), serta fasilitas penunjang (35%). Estimasi kebutuhan investasi awal mencapai Rp. 1,1 Milyar dengan produksi DOD sejumlah 2000 ekor/minggu dan tingkat kematian DOD sebesar 20%. Rata-rata produktivitas telur yang dicapai adalah 60% dengan rata-rata produktivitas mesin tetas sebesar 50%.

Kebutuhan investasi lanjutan meliputi komponen distribusi (6%), DOD PS (3%), pakan, obat dan vitamin (49%), laboratorium (27%), dan perbaikan fasilitas (15%). Distribusi pemasaran mencakup 12 wilayah seluruh Indonesia, meliputi: NAD; Sumatera Barat; Lampung; Tangerang, Serang dan Banten; Karawang, Bekasi, Cikarang dan sekitarnya; Sentul, Bogor dan Depok; Subang, Bandung, Cirebon dan sekitarnya; Jawa Tengah, Bangka, Jakarta, Pontianak dan Sulawesi Selatan. *Revenue* yang dihasilkan mencapai Rp. 550 juta dengan *gross profit* 20%. Peluang usaha itik masih

sangat besar karena pasar masih dapat menyerap hasil produksi DOD. Harapan ke depan adalah kemudahan perijinan lalu lintas dalam distribusi DOD ke daerah, akses terhadap *replacement parent stock* dan dukungan pembiayaan yang wajar dan terjangkau.



## **MODEL USAHA BERBASIS KELOMPOK UNTUK PENGEMBANGAN USAHA PEMBIBITAN AYAM LOKAL**

**Edi Diana, S.Pd**

*Ketua Kelompok Peternak Ayam Buras Barokah, Ciamis, Jawa Barat*

### **RINGKASAN**

Kelompok Peternak Ayam Buras Barokah terdiri dari satu kawasan dengan 3 lokasi, yaitu: (i) Lingkungan Karang, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, (ii) Lingkung Pasir Angin, Kelurahan Kertasari, Kec. Ciamis, dan (iii) Lingkungan Karanggedang, Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis. Kelompok Barokah menjadi gabungan ketiga kelompok tersebut, sehingga menjadi Gapoknak dan diharapkan kelompok-kelompok yang sudah mapan dan mandiri dapat membentuk Gapoknak sendiri. Usaha pokok Kelompok Barokah adalah pembibitan dan pembesaran ayam Sentul yang merupakan usaha pelestarian plasma nutfah Kabupaten Ciamis. Kelompok terdiri dari 10 anggota dengan rata-rata kepemilikan sebanyak 238 ekor. Ayam yang dipelihara adalah ayam Sentul dan sebagian besar menggunakan sistem kandang balong/kolam – ayam, atau dikenal dengan "longyam". Kelompok ini telah memanfaatkan teknologi IB dengan tingkat keberhasilan lebih dari 70%. Kegiatan budidaya untuk menghasilkan telur fertil dengan menggunakan kandang sistem *litter* dengan ratio jantan dan betina adalah 1 : 6. Pengembangan pabrik pakan mini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pakan dan meningkatkan kemandirian kelompok. Balai Penelitian Ternak menjadi salah satu mitra kerjasama dalam rangka menggali potensi plasma nutfah ayam khas Ciamis (Ayam Sentul).

Usaha pembibitan ayam lokal kurang menarik bagi investor/pengusaha/pemodal karena berisiko cukup tinggi, pengembalian modal relatif lama, dan memerlukan ketekunan dan kesabaran.

Kerjasama dengan kelompok peternak menjadi sangat penting dan perlu peningkatan pemberdayaan peternak yang difasilitasi oleh peran aktif pemerintah. Pembinaan untuk pengembangan kelompok sangat diperlukan, dimana anggota yang sudah dianggap mapan dapat keluar untuk membentuk kelompok baru yang mandiri. Peluang ekspansi usaha pembibitan masih terbuka luas karena permintaan pasar (DOC, ayam hidup, daging dan telur) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini diindikasikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang sehat dan aman. Namun, hal ini belum didukung oleh produksi bibit dalam jumlah yang sesuai kebutuhan pasar, dan jumlah kelompok pembibit yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kelompok pembesaran. Peluang ini jua masih terbuka lebar bagi para kelompok pembibit, karena siklus berawal dari ketersediaan DOC yang memadai baik jumlah maupun kualitas. Kendala yang dihadapi selama ini diantaranya adalah hama penyakit yang belum sepenuhnya dapat dikendalikan, masih kurangnya permodalan khususnya untuk pengembangan usaha, masih kurangnya penghargaan terhadap kelompok/individu pembibit, dan belum tersampaikan dengan baik hasil-hasil penelitian aplikatif ke peternak. Untuk itu agar ayam lokal mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri diperlukan perhatian yang lebih serius terhadap pemberdayaan plasma nutfah unggas lokal.

## **MODEL USAHA BERBASIS KELOMPOK UNTUK PENGEMBANGAN USAHA PEMBIBITAN ITIK LOKAL**

*Ketua Kelompok Bahana Putra Mandiri, Tasikmalaya, Jawa Barat*

### **RINGKASAN**

Kelompok Tani Ternak Itik Bahana Mandiri merupakan kelompok peternak itik lokal yang mengusahakan ternaknya dari hulu sampai ke hilir. Kelompok ini terbentuk atas dasar keinginan bersama untuk maju dalam manajemen sistem pemeliharaan itik yang intensif, sehingga dapat meningkatkan skala usaha dan populasi itik. Hal ini diharapkan dapat bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kelompok ini bertujuan untuk: (i) mewujudkan wadah usaha di bidang peternakan itik, (ii) menjadikan sarana diskusi dan tukar informasi teknologi peternakan itik, (iii) membangun sarana pembinaan kelompok, dan (iv) membentuk sarana pemusatan pembibitan itik khas Tasikmalaya. Jumlah anggota peternak mencapai 30 orang. Unit produksi yang ada saat ini adalah pembibitan, penetasan, budidaya, pemotongan dan produksi mesin tetas dengan rata-rata tingkat daya tetas mencapai 70%. Jumlah peternak pada usaha pembibitan adalah sekitar 30 orang dengan jumlah kandang bibit 25 unit. Produksi telur tetas mencapai 300 butir/hari dan produksi telur konsumsi 450 butir/hari. Menggunakan mesin tetas produksi sendiri, terdapat 40 unit mesin tetas unit dengan kapasitas mesin 300 butir/unit. Rata-rata usaha pemotongan mencapai 300 ekor pemotongan/hari dengan bobot antara 1,2 kg – 1,5 kg. Pasokan itik siap potong berasal dari dalam kelompok dan luar kelompok melalui program kemitraan. Pemotongan dilakukan di Rumah Potong Unggas milik kelompok.

Permasalahan yang ada antara lain meliputi: (i) masih ada sebagian anggota yang melaksanakan budidaya dengan sistem umbaran/tradisional, (ii) belum terdapat sarana dan prasarana untuk

mengolah pakan sendiri, (iii) belum mampu memenuhi permintaan konsumen hotel sesuai standar yang diinginkan, dan (iv) belum tersedia bibit unggul untuk itik pedaging secara berkelanjutan.



## **PEMBIBITAN UNGGAS LOKAL**

**Dr. L. Hardi Prasetyo**

*Balai Penelitian Ternak*

### **RINGKASAN**

Aspek pembibitan unggas meliputi: (i) sistem produksi, (ii) sistem seleksi induk, (iii) sistem perkawinan, (iv) model pembibitan dan, (v) kelayakan usaha. Dalam sistem produksi diperlukan keberadaan peternak budidaya sebagai konsumen utama bibit serta pola usaha para peternak budidaya dan skala usaha yang minimum. Diperlukan bibit dalam sistem pembibitan dengan sumber bibit yang dapat diandalkan, tingkat produksi dapat diketahui, dapat menghindari penyakit dan ternak yang seragam. Dalam program pemuliaan harus diperhatikan sistem seleksi induk untuk perbaikan atau pemurnian galur. Sistem perkawinan/persilangan untuk mengeksploitasi heterosis atau strategi tata niaga memerlukan pembinaan dan pendampingan intensif oleh tenaga ahli. Sistem seleksi induk merupakan alat dalam perbaikan secara genetis dan harus memiliki tujuan yang jelas sebagai unggas petelur atau pedaging. Untuk unggas tujuan produksi telur faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah efisiensi pakan, produksi telur, umur pertama bertelur, bobot dan ukuran telur. Sedangkan hal tersebut untuk tujuan daging meliputi efisiensi pakan dan pertumbuhan. *Recording* merupakan syarat mutlak untuk dapat berlangsungnya sistem perkawinan/persilangan dengan benar.

Sistem perkawinan merupakan alat dalam perbaikan secara genetis dengan strategi pemanfaatan keunggulan hibrida dan strategi tata niaga untuk menghasilkan produk spesifik sebagai kombinasi berbagai genotipa. Perlu adanya sistem pembibitan yang jelas sesuai stratifikasi bibit. Terdapat 2 model pembibitan yaitu, (i) usaha

pembibitan kelompok dimana sistem produksi dilakukan oleh suatu kelompok dan biaya ditanggung bersama, dan (ii) usaha pembibitan komersial yaitu usaha independen oleh swasta/BUMN/BUMD dengan skala usaha komersial untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor. Balai Penelitian Ternak telah merintis program pemuliaan sesuai kaidah-kaidah ilmiah untuk menghasilkan galur-galur unggul. Hasil program pemuliaan perlu diakui dalam bentuk pelepasan galur dimana hasil teknologi pemuliaan tersebut selanjutnya diuji-cobakan di lapang pada tingkat peternak. Perlu upaya-upaya untuk mendorong munculnya pembibit komersial dan dilakukan pendampingan teknologi dalam komersialisasi pembibitan.

## **PROSPEK, PENYIAPAN dan PENANGKARAN AYAM LOKAL TERSELEKSI HASIL RISET atau KERJASAMA RISET**

**Prof (R) Dr. Sofjan Iskandar**

*Balai Penelitian Ternak*

### **RINGKASAN**

Proses seleksi ayam lokal sangat diperlukan dengan mempertimbangkan hal-hal seperti: tersedianya sumberdaya genetik rumpun ayam lokal yang potensial, adanya keinginan bersama dalam peningkatan manfaat ayam lokal oleh pelaku usaha (skala kecil, menengah dan besar), serta adanya keinginan peneliti dalam memahami misteri-misteri biologis, ekonomis dan sosial ayam lokal untuk kesejahteraan umat manusia. Tujuan melakukan seleksi ayam lokal rumpun Kampung adalah untuk meningkatkan produksi telur dan menghilangkan sifat mengeram serta menseleksi ayam lokal rumpun Sentul untuk peningkatan bobot potong umur 10 minggu  $\pm$  1,3 kg. Seleksi dilakukan terhadap ayam kampung dan ayam Sentul. Seleksi pada ayam kampung dilakukan terhadap 50% individu-individu yang memproduksi tertinggi dan pengeluaran ayam-ayam yang mengeram. Pada ayam Sentul seleksi terhadap bobot hidup dilakukan pada anak ayam umur 10 minggu. Perkawinan dilakukan dengan metode inseminasi buatan, dan uji multilokasi dilakukan pada kelompok dan instansi pemerintah terkait.

Permintaan pasar konsumen yang semakin besar dipacu oleh permintaan dari beberapa pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota (Sulawesi Selatan, Gorontalo), serta semakin berkembangnya kuliner daging ayam lokal mengindikasikan usaha ini memiliki prospek yang sangat baik untuk pengembangan ayam lokal. Diperlukan adanya *linkage* antara penangkar sumber daya genetik (SDG) (plasma nutfah) – pembibit (lembaga pemerintah dan/atau



swasta) – *multiplier* – sebagai penyedia *final stock* yang berkesinambungan atas dasar kerjasama untuk dapat menghasilkan nilai tambah secara ekonomi. Konsistensi perhatian pemerintah akan pemanfaatan dan pelestarian SDG unggas lokal sangat diperlukan. Kendala teknis yang dihadapi meliputi: produktivitas yang masih relatif rendah, peningkatan populasi relatif lambat, penyebaran vaksin dan obat masih berkisar di sekitar peternakan ayam ras serta pengetahuan biosekuriti peternak belum berkembang. Kendala non teknis antara lain adalah belum sepenuhnya kebijakan pemerintah terhadap perlindungan peternak kecil dan menengah, serta belum adanya sistem insentif bagi pelaku pelestarian plasma nutfah. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan usaha ayam lokal, pelaksanaan kontes kemurnian sebagai pembelajaran masyarakat terhadap kemurnian berbagai SDG ayam lokal serta perlu evaluasi perkembangan (pemanfaatan dan pelestarian) oleh pemerintah dan asosiasi/organisasi profesi. Disarankan pula untuk melakukan perbaikan aturan (Kepres, Kepmentan, aturan-aturan lainnya) untuk melindungi peternak kecil sejalan dengan upaya percepatan populasi, pembangunan sistem insentif untuk masyarakat yang melestarikan SDG ayam lokal dan mekanisme kerjasama dan pendanaannya.









ISBN : 978-602-8475-55-6

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan**

Jalan Raya Pajajaran Kav. E 59, Bogor 16151

Telp. (0251) 8322185, 8322138

Fax. (0251) 8328382, 8380588

E-mail: [criansci@indo.net.id](mailto:criansci@indo.net.id)